

BAB V

PEMBAHASAN

A. Sumber Potensi Kebakaran

Perusahaan telah memenuhi OHSAS 18001 : 2007 klausul 4.3.1 bahwa “Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi bahaya yang ada, penilaian risiko, dan penetapan pengendalian yang diperlukan.”

PT. XYZ telah melakukan upaya pencegahan dan pengendalian sumber potensi bahaya. Upaya ini merupakan bentuk pengendalian bahaya secara rekayasa teknik. Sehingga perusahaan telah memenuhi OHSAS 18001:2007 klausul 4.3.1 yang menyatakan bahwa pengendalian bahaya memiliki hirarki ; (1) eliminasi (2) substitusi (3) rekayasa teknik (4) administrasi (5) APD.

B. Manajemen Keselamatan Kebakaran

1. Kebijakan Perusahaan dan Komitmen Manajemen

PT. XYZ telah mempunyai komitmen manajemen yang diwujudkan dalam bentuk *Health, Safety & Environment Policy* yang ditandatangani oleh direktur utama PT. XYZ yaitu Firman A. Yaman pada tanggal 10 Januari 2014 yang dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan mitra kerja agar dapat dipahami dan diterapkan sebagai budaya kerja di PT. XYZ

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa “Penetapan kebijakan K3

dilaksanakan oleh pengusaha” dalam hal ini PT. XYZ telah membentuk dan menjalankan kebijakan K3. Sehingga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Di dalam jurnal “Penerapan Manajemen Risiko Kebakaran Di Area Produksi Pt Wilmar Bioenergi Indonesia Kawasan Industri Dumai–Pelintung Tahun 2015” juga telah disebutkan bahwa kebijakan mengenai kebakaran telah dilaksanakan oleh pihak manajemen dengan melakukan sosialisasi berupa pelatihan *training basic safety*.

2. Inspeksi Rutin

Inspeksi rutin telah dilakukan oleh PT. XYZ terhadap sistem proteksi aktif kebakaran yaitu APAR, *hydrant*, *fire monitor*, *emergency escape breathing apparatus (EEBA)* dan *self contained breathing apparatus (SCBA)* dilakukan sebulan sekali oleh HSE *Inspector*, dan untuk *fire monitor* dilakukan pengujian satu minggu sekali pada hari Sabtu dan Minggu.

Pemeriksaan dan pengujian ini telah sesuai dengan Instruksi Menteri Tenaga Kerja No.Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran Bab IV tentang Pemeriksaan dan Pengujian telah disebutkan pengawasan dan pengujian terhadap APAR, alarm dan detektor, serta *hydrant*.

Pada jurnal “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kebakaran Di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun

2013” juga telah disebutkan bahwa inspeksi dan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran dilakukan secara rutin. Pemeriksaan juga bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) terhadap tabung APAR selama periode setahun sekali.

3. Regu Pemadam Kebakaran

Di *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ telah membuat regu pemadam kebakaran, dimana regu pemadam kebakaran ini merupakan bagian dari ERT (*Emergency Response Team*) dari tim *production* yang dipimpin oleh CCRO (*Central Control Room Operator*) namun belum sesuai menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja Lampiran III mengenai Rasio Jumlah Minimum, Klasifikasi, Kualifikasi dan Kompetensi personil Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja yang menyebutkan bahwa untuk jumlah tenaga kerja lebih dari 100 sampai dengan 200 orang dengan tingkat risiko bahaya kebakaran berat harus memiliki satu ahli K3 spesialis penanggulang kebakaran, dua koordinator unit penanggulangan kebakaran, tujuh regu penanggulangan kebakaran, dan 28 pemimpin petugas peran kebakaran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja Pasal 6 Ayat 3 bahwa “Koordinator unit penanggulangan kebakaran untuk tempat kerja risiko bahaya kebakaran sedang II, dan

sedang II, dan berat, sekurang-kurangnya 1(satu) orang untuk setiap unit kerja. Dalam hal ini PT. XYZ sudah mempunyai koordinator unit penanggulangan kebakaran sehingga telah sesuai dengan peraturan tersebut.

4. Pelatihan Pemadaman Kebakaran

Tim regu pemadam kebakaran diberikan *Fire Fighting Training* dalam kurun waktu empat tahun sekali di Pusdiklat Migas Cepu. Pelatihan ini bertujuan untuk menanamkan *skill* memadamkan kebakaran kepada regu pemadam kebakaran agar ketika menjumpai hal yang berpotensi menyebabkan kebakaran, mental tim sudah terlatih, sehingga tidak panik dan melakukan penanggulangan dini sebelum api meluas dengan cara yang benar.

Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 9 ayat 3 yang berisi “Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pada kecelakaan”.

Pada jurnal “Analisis Pencegahan Kebakaran Sebagai Upaya Pengendalian Kebakaran PT. PJB UBJ O&M Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton Kabupaten Probolinggo 2013” disebutkan bahwa Perusahaan menetapkan program pelatihan dalam menanggulangi kebakaran melalui induksi K3 (*safety induction*), pelatihan khusus dan pelatihan K3 serta

memberikan pelatihan dasar pemadaman kebakaran (teknik isolasi, penggunaan APAR, hidran dan mobil pemadam.

5. Simulasi Pemadaman Kebakaran

Simulasi kebakaran juga dilakukan oleh *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ satu tahun sekali dengan waktu yang sudah terjadwal. Dengan diberikan simulasi kebakaran, diharapkan seluruh tenaga kerja di *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ siap dan tidak panik saat terjadi kebakaran serta dapat melakukan penanggulangan dini dengan cara yang benar sebelum api meluas.

Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung BAB VIII Ketentuan Umum Pengelolaan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung poin 8.6.5. yang berisi “Simulasi Kondisi. Latihan dilakukan pada waktu yang ditentukan atau bisa juga tidak ditentukan dan di bawah kondisi beragam untuk simulasi kondisi yang tak biasa yang dapat terjadi pada keadaan darurat sebenarnya”.

6. Evaluasi

Evaluasi terhadap kinerja dilakukan rutin setiap 1 tahun sekali dalam rapat tahunan antara pihak manajemen dengan HSE sekaligus untuk melakukan *review* terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan program kerja tahunan atau belum, jika ada perubahan kegiatan disebutkan pula alasan perubahan tersebut serta kendala yang dihadapi beserta *problem solving*nya.

Pasal 14 Ayat 1 pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja k3

7. Dokumentasi

Semua bentuk dokumen yang terkait dengan program kerja tentang kebakaran atau situasi darurat sudah dilakukan dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak manajemen. Bentuk dokumentasi yang ada seperti dokumen *emergency drill* yang mencakup latihan situasi tanggap darurat beserta uraian pelaksanaannya, kemudian surat ijin kerja yang didokumentasikan, dan pemeriksaan terhadap sarana pemadam kebakaran.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 12 Ayat (1) huruf f yang berbunyi “Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus : mendokumentasikan seluruh kegiatan”

C. Sistem Proteksi Pasif

1. Surat Ijin Kerja

Surat ijin kerja di *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ yakni ijin kerja panas, ijin kerja dingin serta *certificates isolation*, *certificates confined space entry*, *certificates excavation*, *certificates camera usage*, *certificates radiation*, *certificates subsea operation*, *certificates vehicle entry*.

Pembuatan surat ijin kerja ini sejalan dengan instruksi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Bab XX tentang Larangan dan Pencegahan Umum Dalam Tempat Pemurnian dan Pengolahan Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi “Orang-orang yang tidak berkepentingan dilarang memasuki tempat pemurnian dan pengolahan, kecuali dengan izin Kepala Teknik” dan Ayat (3) yang berbunyi “Dilarang membawa atau menyalakan api terbuka, membawa barang pijar atau sumber yang dapat menimbulkan percikan api di dalam tempat pemurnian dan pengolahan, kecuali di tempat-tempat yang ditentukan atau dengan izin Kepala Teknik. Untuk keperluan tersebut Kepala Teknik wajib menunjuk petugas-petugas yang berhak memeriksa setiap orang. Petugas-petugas tersebut harus dicatat dalam Buku Pemurnian dan Pengolahan”.

2. Penyalur Petir

Perusahaan telah memasang penyalur petir dengan sistem pertanahan atau *grounding system*. Sistem pentanahan berfungsi sebagai sarana mengalirkan arus petir yang menyebar ke segala arah di dalam tanah.

Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Permenaker No.Per.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir di Bab II Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi “bangunan di mana disimpan, diolah, atau digunakan bahan yang dapat meledak atau terbakar harus memiliki

instalasi penyalur petir”.

3. *Fire Safety Sign* dan Poster Bahaya Kebakaran

Terkait dengan bahaya kebakaran, di *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ telah menempatkan *fire safety sign* di titik-titik yang berpotensi mengakibatkan bahaya kebakaran. Serta terdapat tata tertib saat akan memasuki *plant* yaitu larangan membawa korek api dan rokok, peralatan yang dibawa masuk adalah peralatan *Explosion Proof*, dan penggunaan *hot work permit* untuk pekerjaan panas.

Untuk mengantisipasi pekerja dan pengunjung yang merokok di area-area rawan bahaya kebakaran, di *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ telah melakukan pengendalian dengan menyediakan area dimana mereka bisa merokok yang juga diberi tanda ”KAWASAN MEROKOK” dengan menyediakan asbak. Serta dilakukan *safety patrol* harian untuk mengawasi pekerja dan pengunjung di area *red zone*.

Dalam hal ini perusahaan telah menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 14 huruf a yang berisi “Pengurus diwajibkan secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, Undang-Undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat- tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja”. Dan pasal 14 huruf b yang berisi “Kewajiban pengurus yaitu memasang dalam tempat kerja yang diwajibkan dan semua

bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pengawas atau ahli Keselamatan Kerja”.

Khusus untuk tanda “DILARANG MEROKOK”, perusahaan telah menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung BAB VIII Ketentuan Umum Pengelolaan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung poin

8.10.1. “Apabila merokok dianggap sebagai ancaman terhadap bahaya kebakaran, OBS berhak untuk memerintahkan pemilik menulis dan menempelkan tanda “DILARANG MEROKOK” di tempat yang mencolok, lokasinya ditempat dilarang merokok”.

Penyediaan kawasan merokok, yang berarti di *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ telah menerapkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung BAB VIII Ketentuan Umum Pengelolaan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung poin 8.10.2. “Dalam daerah bila merokok diperkenankan, harus disediakan asbak yang tidak mudah terbakar”.

D. Sistem Proteksi Aktif

1. Sistem Pemadam Kebakaran

a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Dalam hal terkait pemasangan dan pemeliharaan APAR, di *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam

Api Ringan.

Syarat-syarat pemasangan APAR yang telah dilaksanakan di *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ antara lain sebagai berikut:

- 1) Setiap alat pemadam api ringan sudah ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan dapat diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan seperti dijelaskan Bab II tentang Pemasangan, Pasal 4 ayat 1. Setiap alat pemadam api ringan juga sudah digantung setinggi 120 cm dari permukaan lantai seperti disebutkan pada Pasal 8.
- 2) Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut adalah 125 cm dari dasar lantai seperti dijelaskan pada Bab II, Pasal 4 ayat 3.
- 3) Pemasangan dan penempatan APAR sudah sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran seperti disebutkan di Bab II, CO₂ pemadaman jenis minyak.
- 4) Penempatan antara APAR yang satu dengan APAR yang lainnya ada yang melebihi 15 meter dan ada yang tidak. Hal ini diselesaikan dengan luas cakupan wilayahnya seperti dijelaskan dalam Bab II, Pasal 4 ayat 5.
- 5) Semua tabung APAR sudah berwarna merah seperti disebutkan pada Bab II, Pasal 4 ayat 6.
- 6) Setiap APAR sudah dipasang atau ditempatkan menggantung pada dinding dengan sengkang atau konstruksi lainnya atau dalam boks yang tidak terkunci. Namun bila terkunci, di dalam boks tersebut

sudah tersedia kunci yang dapat dengan mudah dipecah kaca pelindungnya seperti dijelaskan Bab II pasal 6 ayat 1 dan 2.

Sedangkan syarat-syarat pemeliharaan APAR yang dianjurkan pada Bab III Pasal 12 ayat 1 adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap alat pemadam api diperiksa setiap 6 bulan sekali atau setahun 2 kali.
- 2) Cacat pada perlengkapan APAR yang ditemui pada waktu pemeriksaan harus segera diganti dengan yang tidak cacat.

APAR yang berada di *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ sudah di periksa secara rutin yaitu setiap 1 bulan sekali oleh HSE *Inspector*. Pemeriksaan meliputi keadaan visual APAR, tekanan, dan tanggal *expired*. Jadi, pemeliharaan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan peraturan.

b. Hydrant

Di *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ terdapat 3 jenis *hydrant*, yakni *hydrant* sistem basah atau *wet barrel fire hydrant* yang terdapat di daerah selatan yang meliputi bagian perkantoran dan hidrant system kering atau *dry barrel fire hydrant* yang terdapat di area *plant*. Dan jenis yang terakhir adalah *hydrant* monitor atau *fixed hydrant monitor* sejumlah 30 unit.

Dalam Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pemurnian Gas dan Minyak Bumi Bab XIX Pasal 34 Ayat (2) disebutkan, “Pengusaha wajib menyediakan alat pemadam

kebakaran beserta perlengkapan penyelamat yang baik yang setiap saat siap untuk digunakan, termasuk instalasi air yang permanen dengan tekanan yang diperlukan lengkap dengan *hydrant* secukupnya, mobil pemadam kebakaran dengan air dan bahan kimia dalam jumlah yang cukup dan apabila diperlukan, instalasi permanen untuk pemadam kebakaran dengan bahan kimia.”

Sehingga pemasangan instalasi *hydrant* ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pemurnian Gas dan Minyak Bumi Bab XIX Pasal 34 ayat (2) tersebut.

c. *Fire Springkler Deluge System & Foam Chamber*

1) *Fire Springkler Deluge System*

Selain *hydrant* dan APAR, di *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ juga memiliki sarana pemadam kebakaran yaitu *Fire Springkler Deluge System*. *Fire Springkler Deluge System* adalah sistem dimana kepala *springkler* yang terhubung dengan saluran pipa sudah terbuka atau dirancang khusus saat terjadi kebakaran untuk memadamkan api yang juga berfungsi sebagai sistem *cooling*. Sehingga dalam hal ini perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 dan 4 ayat 1 huruf (b) yang berisi tentang mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.

2) *Foam Chamber*

perusahaan juga memiliki unit *fire fighting* dengan cara kerja sebagai *cooling*. *Foam Chamber* yang terpasang di *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ meliputi area *Crude Oil Storage Tank* dan *Sphere Tank*. Sehingga perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 dan 4 ayat 1 huruf (b) tentang mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.

d. *CO₂ Snuffing System*

Perusahaan juga mempunyai *CO₂ Snuffing System* gunaantisipasi terhadap bahaya kebakaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 dan 4 ayat 1 huruf (b) yang berisi tentang mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.

2. Sistem Deteksi Kebakaran

Saat ini di *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ telah mengaplikasikan sistem *fire detector* yang dilengkapi dengan *buzzer* serta lampu indikator berwarna merah. Jenis *fire detector* yang terdapat di *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ adalah detektor panas (*heat detector*), detektor asap (*smoke detector*), detektor nyala api (*flame detector*), dan *Manual Call Point* dimana sistem ini bekerja secara otomatis dibawah kendali CCR (*Central Control Room*).

Merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No :

PER/02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik Pasal 3 Ayat 1 yang berisi “Detektor harus dipasang pada bagian bangunan kecuali apabila bagain bangunan tersebut telah dilindungi dengan sistem pemadam kebakaran otomatis”.

Sehingga pemasangan detektor yang telah diinstalasikan di *Onshore Processing Facilities* PT.XYZ telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No : PER/02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik Pasal 3 Ayat 1 tersebut.

3. *Water system*

Penyediaan *Water system* sejalan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 dan 4 ayat 1 huruf (b) yang berisi tentang mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.

E. Sarana Penyelamat Kebakaran

1. Sarana Evakuasi

a. Jalur Evakuasi

Di *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ telah memiliki jalur evakuasi sebagai langkah awal penyelamatan diri apabila terjadi keadaan darurat agar tidak ada korban jiwa. Tanda jalur evakuasi yang ada *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ jaraknya berbeda-beda sesuai tata letak ruangan dan bebas hambatan. Penempatan tanda jalur evakuasi terletak di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh mata dengan tulisan dan arah panah berwarna putih dan background berwarna hijau.

Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung BAB III Sarana Penyelamatan poin 3.2 tentang fungsi yang berisi “Setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan sarana jalan ke luar yang dapat digunakan oleh penghuni bangunan gedung, sehingga memiliki waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri dengan aman tanpa terhambat hal-hal yang diakibatkan oleh keadaan darurat”. Dan poin 3.3. tentang persyaratan kinerja yang berisi “

- 1) Sarana jalan ke luar dalam bangunan gedung baru dan yang sudah ada harus memenuhi persyaratan teknis ini.
- 2) Sarana jalan ke luar dari bangunan gedung harus disediakan agar penghuni bangunan gedung dapat menggunakannya untuk penyelamatan diri dengan jumlah, lokasi dan dimensi sesuai dengan:
 - (a) jarak tempuh; dan
 - (b) jumlah, mobilitas dan karakter lain dari penghuni bangunan gedung; dan
 - (c) fungsi atau penggunaan bangunan gedung; dan
 - (d) tinggi bangunan gedung; dan
 - (e) arah sarana jalan ke luar apakah dari atas bangunan gedung atau dari bawah level permukaan tanah.
- 3) Jalan keluar harus ditempatkan terpisah dengan memperhitungkan:
 - (a) jumlah lantai bangunan gedung yang dihubungkan oleh jalan

ke luar tersebut; dan

(b) sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan

gedung; dan

(c) fungsi atau penggunaan bangunan gedung; dan

(d) jumlah lantai yang dilalui; dan

(e) tindakan petugas pemadam kebakaran.

b. Muster Point

Di area *Onshore Processing Facilities* PT. XYZ sudah di buat suatu zona aman sebagai tempat berkumpul sementara bagi korban bencana seperti kebakaran. Area ini dinamakan *assembly point*. *Assembly point* berfungsi sebagai tempat berkumpul sementara bagi korban bencana yang selanjutnya akan dipindahkan ke tempat yang lebih besar, yakni *muster point*. Letak *assembly point* dan *muster point* juga disampaikan pada saat *safety induction* baik ketika rapat maupun ada pengunjung.

Hal ini telah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja Pasal 2 ayat 2 huruf b yang berisi “Kewajiban mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan sarana deteksi, alarm, memadamkan kebakaran dan sarana evakuasi”.

2. Tim Penanggulangan Keadaan Darurat

Perusahaan sudah menerapkan *emergency response plan*. Struktur organisasi yang di khususkan untuk menangani keadaan darurat di perusahaan telah dibentuk. Setiap peran memiliki tanggung jawab berbeda dengan demikian keadaan darurat dapat ditanggulangi.

Keadaan darurat yang dimaksud antara lain: kebakaran, kecelakaan, peledakan, bencana alam. Semua tenaga kerja yang terlibat dalam tim tanggap darurat telah dilatih dengan baik. Pelatihan yang telah diberikan adalah *training* dan *drill emergency*. Perusahaan telah sesuai dengan Kepmen No. KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempa Kerja pasal 2 ayat 2 huruf (d) yang menyatakan “kewajiban mencegah, mengurangi dab memadamkan kebakaran di tempat kerja meliputi pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja.”

F. Loss Control

Perusahaan telah berupaya dalam melakukan pencegahan terhadap bahaya kebakaran yang mencakup hirarki pengendalian antara lain rekayasa teknik dan pengendalian secara administratif. Hal ini sesuai dengan OHSAS 18001:2007 klausul 4.3.1 yang menyatakan bahwa pengendalian bahaya memiliki hirarki ; (1) eliminasi (2) substitusi (3) rekayasa teknik (4) administrasi (5) APD.